



**RENCANA AKSI
KEUANGAN
BERKELANJUTAN (RAKB)
TAHUN 2025**





KATA PENGANTAR

Sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BPR NBP 6 merespon kebijakan tersebut dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BPR NBP 6 Tahun 2025 sebagai pondasi dan landasan strategik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan Bank. BPR NBP 6 sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. BPR sebagai lembaga perantara (intermediary institution) melalui dana yang yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pembiayaan, maka BPR NBP 6 berkewajiban dalam membiayai debitur secara selektif dengan menghindarkan diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam keterkaitan positif ini (positive linkage), BPR NBP 6 menyadari pentingnya isu pengelolaan Keuangan Berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip triple bottom line yaitu People (Sosial), Planet (Lingkungan) dan Profit (Ekonomi) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau ESG (Environmental, Social and Governance). BPR NBP 6 berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) agar dapat secara efektif mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan atau periode 2024 - 2028 dimana sesuai dengan kategori BPR modal inti kurang dari Rp. 50 milyar pertama kali menyusun RAKB pada tahun 2023 dan selanjutnya pada tahun 2024 mulai mengimplementasikannya. Rujukan yang digunakan sebagai acuan BPR NBP 6 dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu POJK Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan/ atau Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

DAFTAR ISI

SAMPUL LAPORAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	4
1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	4
1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan	5
1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5
1.4. Program yang Akan Dilaksanakan Dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5
1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan	7
1.6. Seluruh Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	7
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	8
2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan	8
2.2. Keterlibatan Pihak Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	8
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	9
3.1. Rencana Strategis Bank	9
3.2. Kapasitas Organisasi	9
3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	11
3.4. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal	11
3.5. Strategi Komunikasi	11
3.6. Sistem Monitoring	12
3.7. Kebijakan Pemerintah	12
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	13
4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/ atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.	13
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	14
5.1. Pegawai, Pejabat, Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi	14
5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	14
5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	14
5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Tercapai Tujuan yang Diinginkan	14
5.5. Penutup	17

BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2025 merupakan awal implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), hingga belum tersedia data hasil penerapan Keuangan Berkelanjutan yang memadai mengenai pelaksanaan sebagaimana yang direncanakan pada tahun 2024.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian	Tahun 2024 (Nominal Dalam Jutaan Rupiah)	
Produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan		
a. Penghimpunan Dana	Nihil	Nihil
b. Penyaluran Dana	Nihil	Nihil
Total Aset Produktif Pada Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Nihil	
b. Total Seluruh Kredit/Pembiayaan	Rp0	
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank	Nihil	
Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Nihil	Nihil
a. Energi terbarukan	Nihil	NPL Nihil
b. Efisiensi energi	Nihil	NPL Nihil
c. Pencegahan dan pengendalian polusi	Nihil	NPL Nihil
d. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	Nihil	NPL Nihil
f. Transportasi ramah lingkungan	Nihil	NPL Nihil
g. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
h. Adaptasi perubahan iklim	Nihil	NPL Nihil
i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (Eco Efficient)	Nihil	NPL Nihil
j. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau	Nihil	NPL Nihil

sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional		
k. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	Nihil	NPL Nihil
l. Kegiatan UMKM	Nihil	NPL Nihil

1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

1.2.1. Visi

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

1.2.2. Misi

Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan :

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan.
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup.

1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai, tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu : Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu menjalankan organisasi yang berbasis kinerja serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan hidup.

1.4. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.4.1. Rencana Satu Tahun

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
1	01 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025	Penyelenggaraan workshop tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan	Workshop dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.
2	01 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.

3	01 Apr 2025 s/d 30 Apr 2025	Efisiensi Penggunaan Listrik	Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2024.
4	01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan.
5	01 Nov 2025 s/d 30 Nov 2025	Mengurangi penggunaan kertas	Penghematan pemakaian kertas dan mendukung program GO Green.	Penghematan pemakaian kertas sebesar 5% dibandingkan tahun 2024
6	01 Des 2025 s/d 31 Des 2025	Penggunaan wadah minuman yang dapat dipakai.	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang berbahaya.	Penurunan penggunaan air kemasan

1.4.2. Rencana Lima Tahun

No	Tahun	Uraian dan Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	2025	Penyelenggaraan workshop tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan	Workshop dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.
2	2025	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
3	2025	Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2024.
4	2025	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan.
5	2025	Mengurangi penggunaan kertas Penghematan pemakaian kertas dan mendukung program GO Green.	Penghematan pemakaian kertas sebesar 5% dibandingkan tahun 2024
6	2025	Penggunaan wadah minuman yang dapat dipakai. Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang berbahaya.	Penurunan penggunaan air kemasan

1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang bersumber dari internal perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab aktivitas / program kerja dengan melibatkan setiap organ dalam struktur organisasi.

1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

1. Divisi Bisnis menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan divisi terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Divisi Operasional mengelola pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan- kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
3. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
4. Divisi Dana dan Jasa dengan menerbitkan atau mengembangkan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya (pengembangan produk).
5. Divisi Teknologi Informasi melakukan penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan.
6. Divisi Sumber Daya Manusia melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
7. Divisi Umum melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BPR NBP 6 dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

a. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I di Indonesia 2015 – 2019. b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 – 2025. c. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. d. Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Bagian Penyusunan RKA Divisi Perencanaan dengan didukung oleh keterlibatan unit kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan RAKB oleh Divisi Bisnis
2. Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Divisi SDM dan Divisi Umum
3. Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Divisi Bisnis, Divisi TI, Divisi SDM & Umum, Divisi Kepatuhan.
4. Langkah strategis khususnya terkait penentuan prioritas program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka pendek dan jangka panjang diarahkan oleh Direksi melalui persetujuan Dewan Komisaris.

BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

3.1. Rencana Strategis Bank

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPR NBP 6 akan terus mengembangkan dan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya pada umumnya dengan target pasar utama adalah pengusaha UMKM dan juga pembiayaan kredit kepada pegawai perusahaan yang telah bekerjasama. BPR NBP 6 juga akan meningkatkan portolio kredit untuk membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPR NBP 6 akan melaksanakan pelatihan– pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari. Sesuai dengan visi BPR NBP 6 untuk menjadi Bank berdaya saing tinggi di Simalungun BPR NBP 6 mempunyai strategi sebagai berikut :

1. BPR NBP 6 akan melakukan penetrasi pasar ke wilayah pemasaran baru di pasar- pasar Tanah Jawa dan sekitar wilayah Simalungun.
2. Ikut serta dalam pemberian kredit sindikasi bersama mitra BPR lainnya
3. Memberikan fasilitas layanan prioritas kepada nasabah yang loyal
4. Pembuatan promosi audio maupun video melalui media sosial.

3.2. Kapasitas Organisasi

3.2.1. Kapasitas Organisasi

Untuk mencapai visi dan misi BPR NBP 6 perlu didukung oleh sumber daya yang handal dan secara struktur organisasi (terlampir) disesuaikan dengan arah kebijakan dan pengembangan bisnis.

Dewan Komisaris Bank

No	Nama	Jabatan
1	Hengky Parsungkunan Sitorus	Komisaris Utama
2	Rasmahita Sitanggang	Komisaris

Direksi Bank

No	Nama	Jabatan
1	Lisna Kristina Raya Saragi	Direktur Utama
2	Parlagutan	Direktur Kepatuhan

Pejabat Eksekutif / Divisi / Unit / Satuan Kerja

No	Nama	Uraian Divisi / Unit / Satuan Kerja
1	Berman Martua Siboro	PE Audit Intern
2	Rina Seftina Pakpahan	PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
3	Darianto Berutu	Kepala Divisi Bisnis
4	Hepta Marnala Sirait	Kepala Divisi Operasional
5	Ramayanti Sinaga	Kepala Divisi SDM dan Umum
6	Jadi Olo Purba	Divisi IT

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing- masing BPR NBP 6 juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

1. Jumlah Komposisi Karyawan

**Jumlah Komposisi Pegawai Bank
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	0
3	Sarjana (S1)	21
4	Sarjana Muda / Diploma	18
5	SMA Atau Sederajat	11
6	SMP Sederajat	1
7	SD Sederajat	0
Total		51

**Jumlah Komposisi Karyawan
Berdasarkan Gender**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	31
2	Perempuan	20
Total		51

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPR NBP 6 dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan training- training untuk pegawai baik itu secara offline maupun online agar BPR NBP 6 dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

3.3.1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Bank sesuai pada tabel di bawah ini:

A. Kinerja Keuangan

(Dalam Juta Rupiah)

No	Indikator	2024 (TW III)	2023	2022
1	Total Aset	Rp81.519.667	Rp68.012.099	Rp49.740.470
2	Modal Inti	Rp7.197.069	Rp7.483.283	Rp7.231.935
3	Kredit Yang Diberikan	Rp60.497.946	Rp52.858.977	Rp38.576.732
4	Dana Pihak Ketiga	Rp57.511.538	Rp51.133.721	Rp40.288.587
5	Pendapatan Operasional	Rp12.585.461	Rp15.330.638	Rp11.570.036
6	Beban Operasional	Rp10.930.465	Rp12.955.223	Rp9.543.977
7	Laba Operasional	Rp1.654.996	Rp1.887.213	Rp2.026.058

B. Rasio Keuangan

No	Rasio	2024 (TW III)	2023	2022
1	Rasio KPMM	14,78%	20,55%	26,76%
2	NPL Gross	4,86%	2,96%	2,50%
3	NPL Net	1,69%	1,05%	1,33%
4	ROA	2,96%	4,04%	4,78%
5	NIM	14,75%	21,64%	21,51%
6	Rasio BOPO	86,85%	84,51%	82,49%
7	LDR	93,49%	88,70%	79,78%

3.3.2. Peningkatan kapasitas teknis teknologi Bank menjadi perhatian utama antara lain dengan penyediaan aplikasi/software berbasis teknologi digital dan infrastruktur teknologi untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan Keuangan Berkelanjutan di masa mendatang.

3.4 Kerjasama Dengan Pihak Eksternal

Dalam program pengembangan kapasitas internal, BPR NBP 6 akan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan ketentuan regulasi.

3.5 Strategi Komunikasi

Secara Internal BPR NBP 6 berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan

Berkelanjutan, BPR NBP 6 terus mengkomunikasi agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif di antaranya :

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan Selanjutnya secara eksternal BPR NBP 6 memberikan edukasi kepada pihak debitur agar memiliki kepedulian dalam menjalankan usahanya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3.6 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat Bisnis yang rutin dilakukan per minggu untuk memonitor kinerja seluruh unit bisnis dan Cabang.
3. Rapat Divisi yang dilaksanakan oleh divisi masing-masing untuk membahas permasalahan bisnis dan operasional.

3.7 Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan RAKB mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.

3.8 Pendekatan Analisis Faktor Penentu

Adapun faktor dari penentu pembuatan RAKB ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity and Threats) dalam menganalisa potensi yang dimiliki oleh BPR NBP 6 Kekuatan (Strengths) Memiliki ketersediaan layanan yang cepat Demografi karyawan yang didominasi oleh usia produktif sehingga memiliki semangat untuk memajukan Bank; Memiliki basis nasabah yang loyal dan sudah lama menjalin hubungan usaha dengan bank Kelemahan (Weakness) Kualitas SDM yang perlu terus ditingkatkan Produk dan layanan masih terbatas; Sistem dan prosedur serta pedoman operasional masih dalam proses penyempurnaan Peluang (Opportunities) Sinergi dengan mitra strategis perusahaan Pertumbuhan UMKM yang baru di sekitar perkantoran Kebijakan pemerintah yang fokus pada tujuan Sustainable Development Goals; Ancaman (Threats) Ketidakpedulian masyarakat yang masih kurang terhadap kelestarian lingkungan hidup; Penggunaan kebutuhan dasar yang menggunakan bahan tidak ramah bagi kesehatan dan lingkungan; Ekosistem ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung bisnis keuangan yang berkelanjutan.

BAB IV

PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/ atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

a. Dasar Pemikiran

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program- program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan pembenahan prosedur operasional.

b. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penyelenggaraan workshop tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	01 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025	Workshop dan Webinar	Kepala Divisi SDM dan Umum

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan diatas membutuhkan dana + Rp 70 juta yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/ praktisi dalam implementasinya

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan oleh divisi terkait.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan Eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

5.1. Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatas berada di bawah Direktur Kepatuhan dan dievaluasi setiap periode akhir kegiatan. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara spesifik peran Direktur Kepatuhan dan masing- masing kepala divisi terkait dibantu oleh Divisi Kepatuhan dalam memantau pelaksanaan Keuangan berkelanjutan dari sisi Kepatuhan melakukan monitoring risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai kerangka penerapan manajemen risiko.

5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektifitas realisasi Rencana Keuangan berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatursebagai berikut:

Penentuan Waktu Untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Triwulanan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Akhir November Tahun Berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB
3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir Mei Tahun berikutnya	Divisi Corporate Secretary

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun- tahun berikutnya,
- b. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya (jika ada).

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan

dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR Nusantara Bona Pasogit 6 melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi risiko.

1. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
2. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan.
 1. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen.
 2. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
3. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.
 1. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka BPR Nusantara Bona Pasogit 6 akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
 3. BPR Nusantara Bona Pasogit 6 memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (cyber security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, BPR Nusantara Bona Pasogit 6 akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
 4. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk

dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi BPR Nusantara Bona Pasogit 6 dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.

5. BPR Nusantara Bona Pasogit 6 akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.
4. Penyaluran kredit berbasis lingkungan.
 1. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
 2. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
 3. Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
 4. Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal bank mengingat meski aturan sudah dibuat, tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran kredit minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
 5. Memberikan insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.
5. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank. Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
6. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan.
 1. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
 2. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan



melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.

3. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

5.5. Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPR NBP 6 ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RAKB (RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan RAKB Tahun 2025 PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 6

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Laporan RAKB Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Tanah Jawa, 03 Desember 2024

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 6

Hengky Parsungkunan
Komisaris Utama

Rasmahita Sitanggang
Komisaris

Lisna K R Saragi
Direktur Utama

Parlagutan
Direktur